

PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

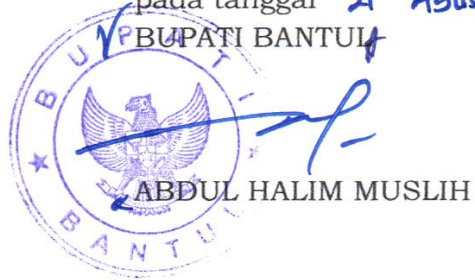
Tahun 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026

adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11					

keterkinian, kemudahan akses, dan kecepatan layanan informasi publik sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

